Pariwara
LAMAN INDO
Saluran Info Terpercaya
MEDIA LOKAL BUTON SELATAN
BACA Berita Menarik hanya di www.lamanindo.com
KAMIS 26 NOVEMBER 2026

DPRD Soroti Proyek Listrik 24 Jam Siompu-Kadatua

Pemkab Buton Selatan Bergerak Cepat

LAMANINDO.COM, BATAUGA - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan menghadirkan listrik 24 jam bagi warga di Pulau Siompu dan Pulau Kadatua pada awal 2027 mulai disorot DPRD setempat. Legislatif menemukan fondasi atau dudukan untuk lima unit mesin diesel bernilai Rp 8 miliar lebih itu belum tersedia di lapangan.



Suriati
Anggota DPRD Buton Selatan



H. Pomili Woma
Anggota DPRD Buton Selatan

ANGGOTA DPRD Buton Selatan, Suriati, mengungkapkan temuan tersebut usai melakukan inspeksi mendadak bersama Wakil Ketua I DPRD La Ode Hasruddin, serta anggota dewan Pomili Womal dan Jufarni ke PLTD Siompu Barat. Ia mengkritisi lemahnya perencanaan teknis dan sinkronisasi infrastruktur pendukung dari pihak eksekutif sebelum melakukan belanja modal bernilai besar.

"Fakta di lapangan menunjukkan fondasi atau dudukan mesin baru itu belum ada sama sekali. Ini menunjukkan perencanaan teknis yang tidak matang. Anggaran Rp 8 miliar lebih sudah digelontorkan untuk pengadaan mesin, tetapi kesiapan ruang dan infrastrukturnya justru luput. Makanya, ini harus kita evaluasi total," tegas Suriati dihubungi usai melakukan kunjungan di PLTD Siompu Barat, Kamis (26/11/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak akan membiarkan proyek strategis daerah berjalan tanpa kepastian teknis yang jelas. Menurutnya, pengadaan unit mesin tidak akan memberi manfaat maksimal bagi rakyat apabila tidak dibarengi kesiapan fondasi yang membutuhkan waktu pengerjaan dan standar konstruksi terukur. Atas dasar itu, ia menilai target penyalaan listrik pada awal 2027 perlu dikaji ulang secara objektif agar tidak sekadar menjadi janji politik.

"Selama ini kinerja OPD teknis terlalu terfokus pada serapan anggaran belanja mesin, tanpa memastikan kesiapan lahan dan dudukan di lokasi. DPRD mendesak rapat evaluasi dan pembahasan ulang bersama seluruh OPD teknis terkait agar proyek pembangunan daerah ini tidak terhambat dan anggaran publik tidak siasia," ujar legislator asal Siompu Barat tersebut.

Sementara itu, Anggota DPRD Buton Selatan lainnya, H. Pomili Womal, menyoroti persoalan ini dari sudut pandang manajemen waktu dan kesiapan lapangan. Menurutnya, pekerjaan konstruksi sipil seperti ruang dan dudukan mesin memiliki tahapan teknis tersendiri yang tidak bisa dikerjakan secara terburu-buru menjelang kedatangan unit.

Pomili menilai, eksekutif terlalu berpacu dengan waktu pengadaan mesin tanpa melakukan mitigasi di lokasi penempatan. Padahal, dalam komitmen awal, layanan listrik 24 jam dijanjikan langsung beroperasi begitu unit mesin tiba menjelang pergantian tahun.

"Ternyata kita temukan di lapangan itu adalah ruang untuk dudukan mesin baru itu belum ada. Makanya ini berarti kita harus bicara ulang," ungkapnya kepada awak media, Kamis (26/11/2026).

Ia menambahkan, pembangunan dudukan mesin membutuhkan perhitungan konstruksi yang presisi agar mampu menopang getaran dan beban mesin dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Pomili mendorong adanya penyesuaian jadwal kerja yang lebih realistis antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis guna mencari jalan keluar yang taktis agar persoalan tidak berlarut-larut.

Di samping pembenahan manajerial, Pomili juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang terbuka kepada masyarakat di Pulau Siompu dan Kadatua. Menurutnya, warga berhak mendapatkan edukasi serta penjelasan yang jujur mengenai situasi riil dan tahapan teknis yang sedang berproses di lapangan, sehingga masyarakat tidak terus-menerus dibayangi ketidakpastian.



DPRD Buton Selatan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan massa aksi dari masyarakat Siompu - Siompu Barat soal listrik di Pulau Siompu.

Sekda Buton Selatan: Besok Tim Akan Turun ke Siompu dan Kadatua

DIKONFIRMASI terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Selatan, La Ode Harwanto menjelaskan, proyek pengadaan lima unit mesin diesel melalui APBD Perubahan 2026 senilai lebih dari Rp 8 miliar itu masih dalam tahap proses. Rinciannya, dua unit mesin berkapasitas 500 kiloVolt-Ampere (kVA) diperuntukkan bagi Pulau Siompu, dan tiga unit berkapasitas 250 kVA untuk Pulau Kadatua.

Terkait belum dibangunnya dudukan mesin, Harwanto mengaku telah berkoordinasi dengan pihak PLN dan mendapatkan gambaran soal dudukan mesin tersebut. Untuk itu, pihaknya bersama tim teknis akan segera turun ke Siompu dan Kadatua untuk memastikan posisi mesin.

"Untuk dudukan mesin, besok (Jumat, 27/11/2026), tim dari pemerintah daerah dan PLN akan turun ke Siompu dan Kadatua, tinjau lokasi untuk memastikan posisi mesin. Secara teknis dudukan mesin harus selesai dua minggu sebelum dipasang untuk menjaga ketahanan fondasi dudukan mesin," akunya.

Harwanto juga memastikan urusan operasional, termasuk pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) saat mesin beroperasi nanti, telah dikoordinasikan dengan PLN Baubau.

"Untuk BBM sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak PLN. Pemerintah daerah hanya sebatas mengalokasikan anggaran untuk pengadaan mesin sampai pada proses lelang. Selebihnya menjadi tanggung jawab penyedia barang dan pihak PLN untuk BBM," tambahnya.

Sejalan dengan dorongan kuat dari Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, Harwanto pun optimistis tidak ada kendala berarti dalam proyek ini, sehingga masyarakat di Pulau Siompu dan Kadatua tetap bisa menikmati aliran listrik 24 jam pada awal tahun 2027. **(sr)**



La Ode Harwanto
Sekda Buton Selatan